

Nama : Emanuel Stefanus K. Kumanireng

NPM : 21.75.7039

## Paradoks demokrasi dan Kebutuhan Wacana

### Alternatif di dalam ruang publik.

#### Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem ideal yang menjadi pilihan terbaik dalam pelebagaan juga konstitusi suatu negara. Di dalam pluraritas, banyak persoalan dan fenomena yang perlu mendapat tempat sebagai pembahasan di dalam diskursus ruang publik. Banyak orang, lembaga, maupun institusi yang memiliki peran, pesan, tuntutan, serta kepentingan untuk suatu *bonum commune*. Salah satu aspek tersebut adalah keberadaan agama. Dan terdapat pandangan bahwa agama tidak punya argumen rasional selain doktrin konservatif di dalam ruang publik, sehingga mematiskan ruang diskusi. Tatai sebelum membahas peranan agama di dalam ruang publik sebagai salah satu indikator pendukung demokrasi, penulis akan sedikit memberikan pandangan kritis terhadap demokrasi, yang penulis sebut sebagai suatu paradoks. Bahwa cita-cita kesetaraan dan kesejahteraan, tetapi melahirkan ketimpangan yang begitu besar. Setelah memberikan pandangan kritis terhadap demokrasi, penulis akan memberikan pandangan bagaimana agama juga masih relevan di dalam diskursus ruang publik untuk demokrasi.

#### Paradoks Demokrasi

Sejarah telah usai SEJARAH telah usai," teriak Francis Fukuyama. Seruan itu tepat didengungkan setelah komunisme di Uni Soviet runtuh lewat program glasnost dan perestroika dan hampir bersamaan dengannya China juga mulai membuka ekonominya. Komunisme dan model ekonomi-terpimpin yang awalnya begitu gagah dan tangguh melawan kapitalisme dan demokrasi liberal, tiba-tiba jatuh tersungkur tak bangkit lagi.<sup>1</sup>

Perang Dingin usai sudah. Lewat seruan Fukuyama ini genderang kemenangan sudah ditabuh. Hingga kini, Demokrasi Liberal dan Kapitalisme menjadi pemenang tunggal peradaban. Lantas, seperti Fukuyama ungkapkan, tugas manusia modern menjadi semakin ironis; hanya merawat dunia yang laksana museum tambo. Tidak ada lagi gairah, perlawanan dan antidot. Cerita

---

<sup>1</sup> Corn Husain Pontoh, *Malapetaka Demokrasi Pasar* (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm. 10.

tentang sosok Che sang petualang revolusi sudah harus dikubur dalam-dalam. Kisah heroik Lenin hanya tinggal sejarah di buku-buku, keberanian Usamah bin Laden cukup hanya tersemat di kaos-kaos anak muda saja.<sup>2</sup>

Narasi besar tentang revolusi dan perlawanan massa hendak diakhiri, tetapi narasi besar yang lain, yang berwujud demokrasi liberal dan kapitalisme harus tetap dibiarkan melenggang.

Benarkah Demokrasi Liberal dan kapitalisme adalah satu-satunya kebenaran? Benarkah tidak akan ada perlawanan terhadap dominasi "Two Towers" (baca: demokrasi liberal dan kapitalisme) ini? Benarkah ini sistem yang terbaik? Benarkah kapitalisme dan demokrasi liberal tidak akan mengalami krisis dan kontradiksi internalnya? ini mencoba, membongkar keyakinan bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme adalah 'kebenaran' yang tunggal, yang tak tergugat.

Karya Coen Husein Pontoh "Malapetaka demokrasi Pasar" mau membuktikan bahwa demokrasi liberal dan neoliberalisme adalah dua sisi mata uang yang menyesatkan peradaban manusia, ini. Karena itu, prakarsa untuk membongkar dan mencarikan alternatifnya adalah sah dan niscaya.

Kritik terhadap demokrasi liberal sudah dari dari banyak dan berkala dan partisipasi rakyat yang tinggiselama pemilu. Cita-cita mulia demokrasi direduksi menjadi sebatas hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Suara rakyat dibutuhkan dan ditambang hanya ketika pemilu datang. Setelah itu, suara rakyat dikhianati dan ditendang; kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat, harga-harga, semakin mahal, pengurusan dimana-mana, BBM dinaikkan, pendidikan dan kesehatan dikomersialisasikan, kemiskinan dan pengangguran tetap saja berkembang biak.

Demokrasi, dalam cita-citanya yang mulia, perlahan-lahan mati. Dalam konteks ini kritik Geoff Mulgan terhadap paradoks demokrasi sangat tepat dan jitu. Ada tiga hal pokok dalam kritiknya terhadap demokrasi.<sup>3</sup>

Pertama, demokrasi cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Bagaimana mungkin tuntutan rakyat banyak bisa diwakili dan digantikan oleh segelintir orang yang menilai politik sebagai karier untuk menambang keuntungan finansial?

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 25.

<sup>3</sup> Jeremy Seabrook, *Kemiskinan Global dan Kegagalan Ekonomi Neoliberal*, penerj. D Armawan (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm. 20

Kedua, prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan dan kompetisi juga telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berusaha bagi pemilik modal besar, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan multinasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas yang penuh tipu daya.<sup>4</sup>

Ketiga, media yang mereduksi partisipasi rakyat. Kelihaihan media mengemas opini publik membuat moralitas politik menjadi abu-abu, juga cenderung menggantikan partisipasi rakyat. Ini berujung pada semakin kecil dan terpinggirkannya 'partisipasi langsung' dan 'kedaulatan langsung' rakyat.

Tidak hanya itu, sesat Pikir kaum demokrasi prosedural juga karena ia menyembunyikan fakta tentang negara dan kekuasaan. Negara, seperti kita semua maklum, adalah tempat akses dan relasi ekonomi, politik, hukum berlangsung. Karena itu, sistem demokrasi juga berhadapan dengan masalah ekonomi.

Negara dan sistem demokrasi juga berhubungan dengan masalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjalankan dan mengatur finansial sebuah negara. Karena itu negara membutuhkan sebuah persekutuan yang taktis dan cepat. Karena hanya model ekonomi kapitalisme yang tersedia' yang bertumpu pada kekuatan modal besar maka demokrasi membutuhkan kapitalisme, begitu juga sebaliknya. Dari sini, persekutuan najis itu mulai tercipta.

Di ujung jalan, tampaknya kapitalismelah yang berkuasa. Atas nama kemajuan dan perdagangan bebas, ia mulai menganggangi negara. Atas nama pertumbuhan ekonomi, ia mulai menyiasati demokrasi. Lalu muncullah makhluk lama dengan baju yang baru: neoliberalisme. Sebuah makhluk yang mengendap-endap muncul, lalu menjalankan taktik "silent take over". Istilah ini dipinjam dari Noreena Hertz, artinya kurang lebih sebuah penjajahan yang terselubung

Paling tidak, ada dua faktor yang mendorong kenapa gagasan tentang neoliberalisme ini dipakai dan diadopsi oleh *rejim anglo america* tersebut. Pertama, ada krisis besar dan resesi ekonomi dunia yang utamanya mengenal Amerika Serikat. Krisis ini semacam krisis overproduksi yang menimpa sejumlah perusahaan multinasional dan perbankan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 30

diakibatkan oleh sistem kapitalisme negara yang dianut oleh kebanyakan negara-negara dunia ketiga dan negara-negara miskin.

Kedua, model negara kesejahteraan(welfarestate) mengalami kebangkrutan akibat besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk jaminan sosialnya rakyatnya. Dengan demikian, ketika gagasan neoliberalisme digulirkan segelintir pihak menuai kemenangan dengan cepat dan massif. Kemenangan gagasan neoliberalisme adalah kemenangan bagi perusahaan multinasional dan sejumlah korporasi yang merasa menderita pada jaman kapitalisme negara. Termasuk juga kemenangan bagi negara maju dan sejumlah korporasinya untuk memberi 'tekanan' pada negara miskin agar mematuhi doktrin khas neoliberal : liberalisasi-privatisasi-deregulasi' pendeknya setelah jaman globalisasi neoliberal menjalar, maka tapak-apak imperialisme ini mulai berjalan. Ini bisa ditandai oleh semakin mengguritanya korporasi internasional yang bersiap mencengkeram seluruh kehidupan rakyat.

Kekuasaan korporasi yang sangat hegemonik dan monopolis ini tentu mengakibatkan sebuah tata dunia yang timpang. Tata dunia yang ditandai oleh ketidakadilan sosial dan makin merebaknya kemiskinan. Sebuah tata dunia yang menghasilkan jurang dan celah yang begitu lebar antara yang kaya dan yang miskin'

Dan disambutlah sebuah jaman yang seringkali disebut-sebut dengan nada optimis yang meluap: transisi menuju demokrasi. Tetapi kemiskinan di dalam era demokrasi dengan itevensi dan penyusupan kepentingan para oligarki adalah sebuah kritik, dan itu butuh alternatif, bukan dominasi.

Suara Profetis Agama di dalam ruang Publik

Harus selalu ada suara alternatif di dalam ruang publik, tidak ada eliminasi terhadap lembaga apapun dalam memberikan pendapat atau tanggapan terhadap suatu persoalan sosial.

Demokrasi menuntut kesetaraan dalam menyampaikan gagasan, dan itu berlaku untuk semua elements masyarakat. Basis argumen yang mendomestikasi agama pada rana privat, sepertinya terlalu terburu-buru karena nilai atau ajaran agama tersebut akan terimplementasi di dalam tindakan dan tingkah laku pemeluk agama tersebut. Suara profetik dari agama, sangat diperlukan di dalam dikursus ruang publik.

Menjaga spiritualitas, dan pandangan pembelaan terhadap mereka yang terlantar atau tersisihkan, adalah salah satu penjaga stabilitas di dalam kehidupan sosial.